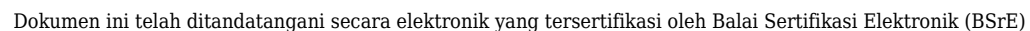




Nomor SOP	:	B/335.4/000.8.3.3/VII/2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	01 Juli 2025
Disahkan Oleh		
Nama SOP		Evaluasi Kinerja



4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);	
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);	
6.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;	
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);	
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);	
9.	Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 33)	
10.	Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;	



11.	Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2. SOP Penetapan Kinerja 3. SOP Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) 4. SOP Pengumpulan Data Kinerja 5. SOP Pengukuran Data Kinerja 6. SOP Pelaporan Kinerja		1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan SAKIP 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program 3. Alat tulis kantor 4. Komputer/laptop 5. Printer 6. Program Kerja
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Apabila pengumpulan data kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan pelaporan akan terhambat		1. Kepala OPD
		: Lembar disposisi/arahan, tanda tangan
		2. Sekretaris OPD
		: Lembar disposisi,paraf
		5. Ketua tim kerja sekretariat
		: Lembar disposisi,paraf
		Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy



No	Uraian Prosedur Pengumpulan Data Kinerja	CAMAT	SEKRETARIS CAMAT	KASI	TIM SAKIP (KASUBAG PERKEU)	STAF	Mutu Baku			Ket
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengundang rapat evaluasi						Data Pengukuran Kinerja	1 hari	Berkas	
2	Menyiapkan bahan rapat evaluasi hasil dan pelaporan kinerja						Data Pengukuran Kinerja	1 hari	Data	
3	Rapat pembahasan evaluasi kinerja						Data Pengukuran Kinerja	1 hari	Berkas	
4	Menyusun notulen rapat evaluasi kinerja						Data Pengukuran Kinerja	1 hari	Berkas	
5	Menyusun hasil dari rapat evaluasi kinerja						Data Pengukuran Kinerja	1 hari	Berkas	
6	Mengesahkan hasil rapat evaluasi kinerja						Data Pengukuran Kinerja	1 hari	Berkas	
7	Mendokumentasikan hasil rapat evaluasi kinerja						Data Pengukuran Kinerja	1 hari	Berkas	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

